

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

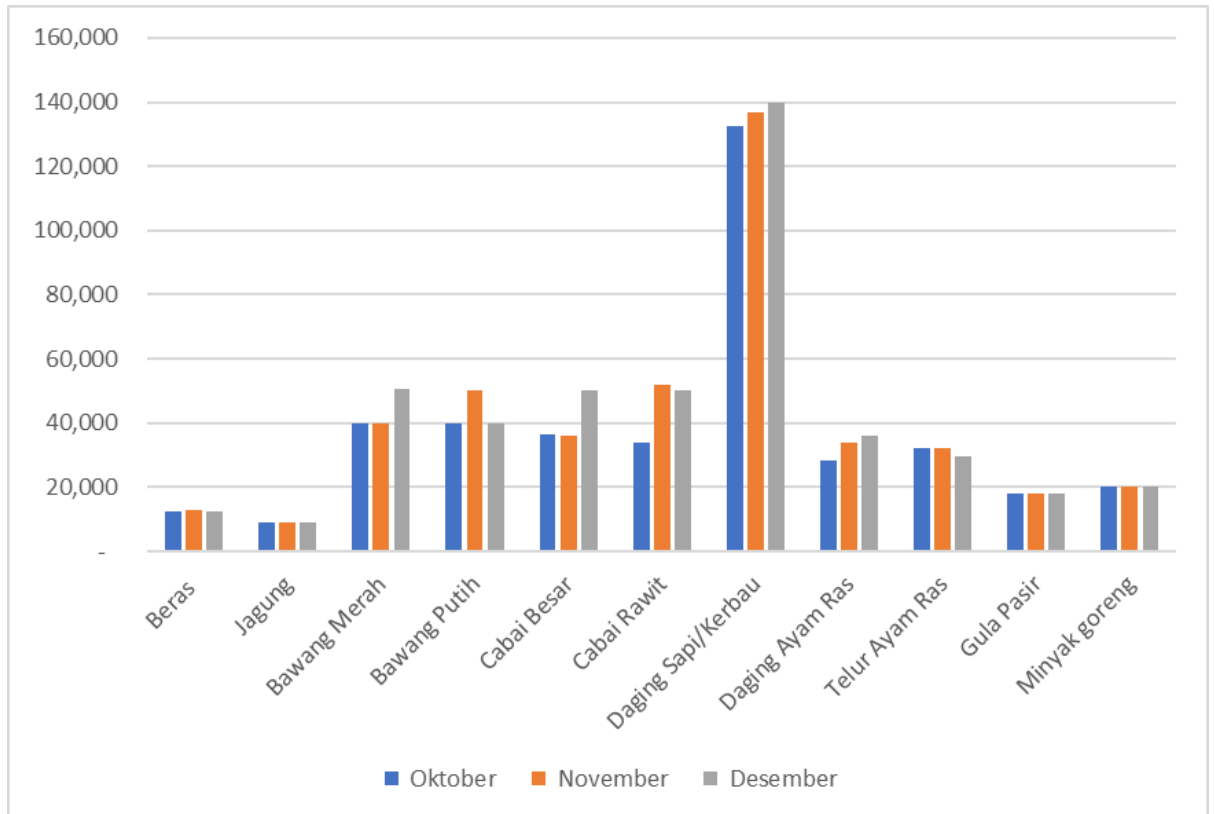
LAPORAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KABUPATEN KONAWE SELATAN TRIWULAN IV 2025

I. PERKEMBANGAN HARGA PADA KABUPATEN KONAWE SELATAN TRIWULAN IV 2025

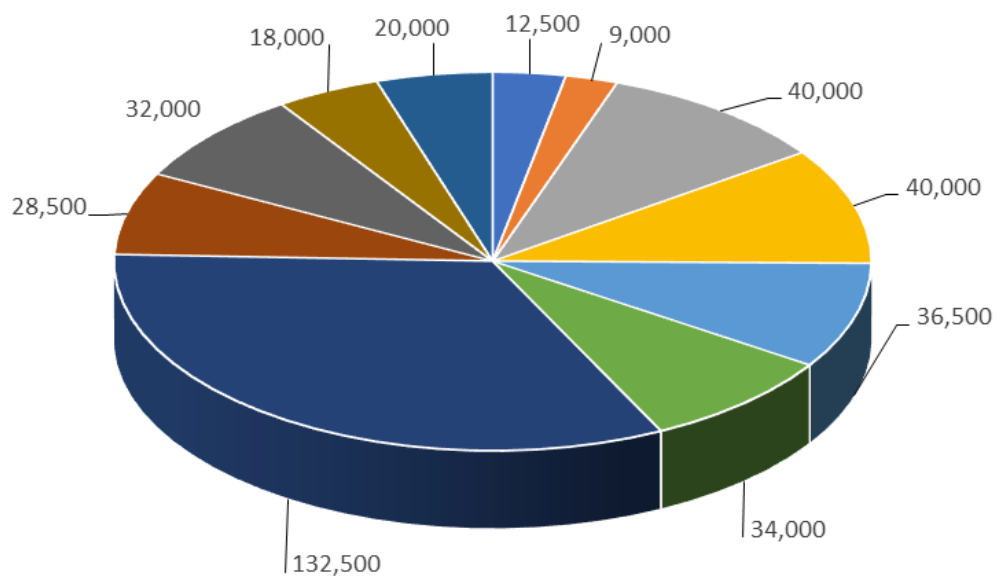
1. Perkembangan harga pada Kabupaten Konawe Selatan didasarkan pada informasi Dinas Ketahanan Pangan yang dikeluarkan secara harian, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dikeluarkan secara mingguan, yang di rekap oleh APIP yang kemudian dilaporkan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Harga rata-rata komoditas beras, jagung, bawang putih, gula pasir dan minyak goreng, relatif **stabil** selama 3 (tiga) bulan terakhir dan tidak memiliki gejolak harga yang signifikan;
3. Harga rata-rata komoditas bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi dan daging ayam ras relatif **meningkat** selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan keterangan sebagai berikut:
 - Komoditas bawang merah naik sebesar Rp.10.500 atau 26% kenaikan di perkirakan akibat kondisi cuaca buruk saat masa tanam/panen sementara permintaan konsumen meningkat karena menjelang natalu dan distribusi terhambat karena logistik yang tidak lancar karena jarak jauh dari zona produksi utama;
 - Komoditas cabai besar naik sebesar Rp.19.000 atau 46%, kenaikan diperkirakan akibat pengaruh yang kuat dari musim panen dan pasokan yang tidak merata;
 - Komoditas cabai rawit naik sebesar Rp.2.000 atau 4%, kenaikan diperkirakan akibat produktivitas cabai rawit mulai berkurang dan adanya kekurangan stok karena tingginya permintaan dari luar daerah;
 - Komoditas daging sapi naik sebesar Rp.7.500 atau 6% disebabkan karena meningkatnya permintaan dari konsumen menjelang natalu;
 - Komoditas daging ayam ras naik sebesar Rp.7.500 atau 26% disebabkan karena meningkatnya permintaan dari konsumen menjelang natalu;
4. Harga rata-rata komoditas telur ayam ras, relatif **menurun** selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan keterangan sebagai berikut:
 - Komoditas telur ayam ras turun sebesar Rp.2.500 atau 8%, penurunan diperkirakan akibat adanya produksi peternak lokal yang melebihi permintaan konsumen sehingga stok tersedia (Over-Supply) dan Pada bulan Desember, setelah periode permintaan tinggi (misalnya Natal & Tahun Baru), ada kemungkinan **permintaan konsumsi telur turun** karena pembelian masyarakat lebih fokus pada kebutuhan lain atau konsumsi protein bergeser. Penurunan daya beli atau preferensi konsumen bisa mengurangi penyerapan telur di pasar tradisional. Penurunan permintaan

ini juga berkontribusi pada turunnya harga;

Grafik Perkembangan Harga Komoditas Pangan Triwulan IV Kab. Konawe Selatan

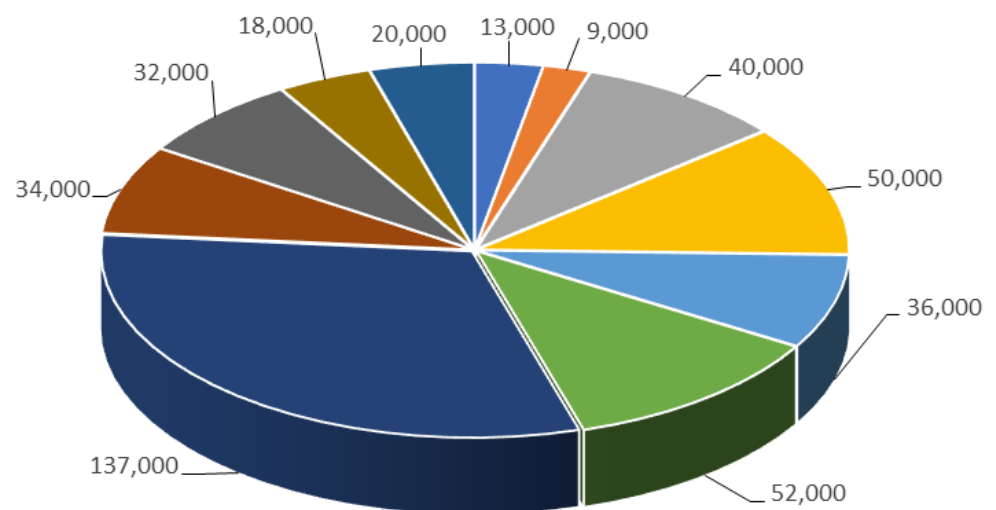


Oktober

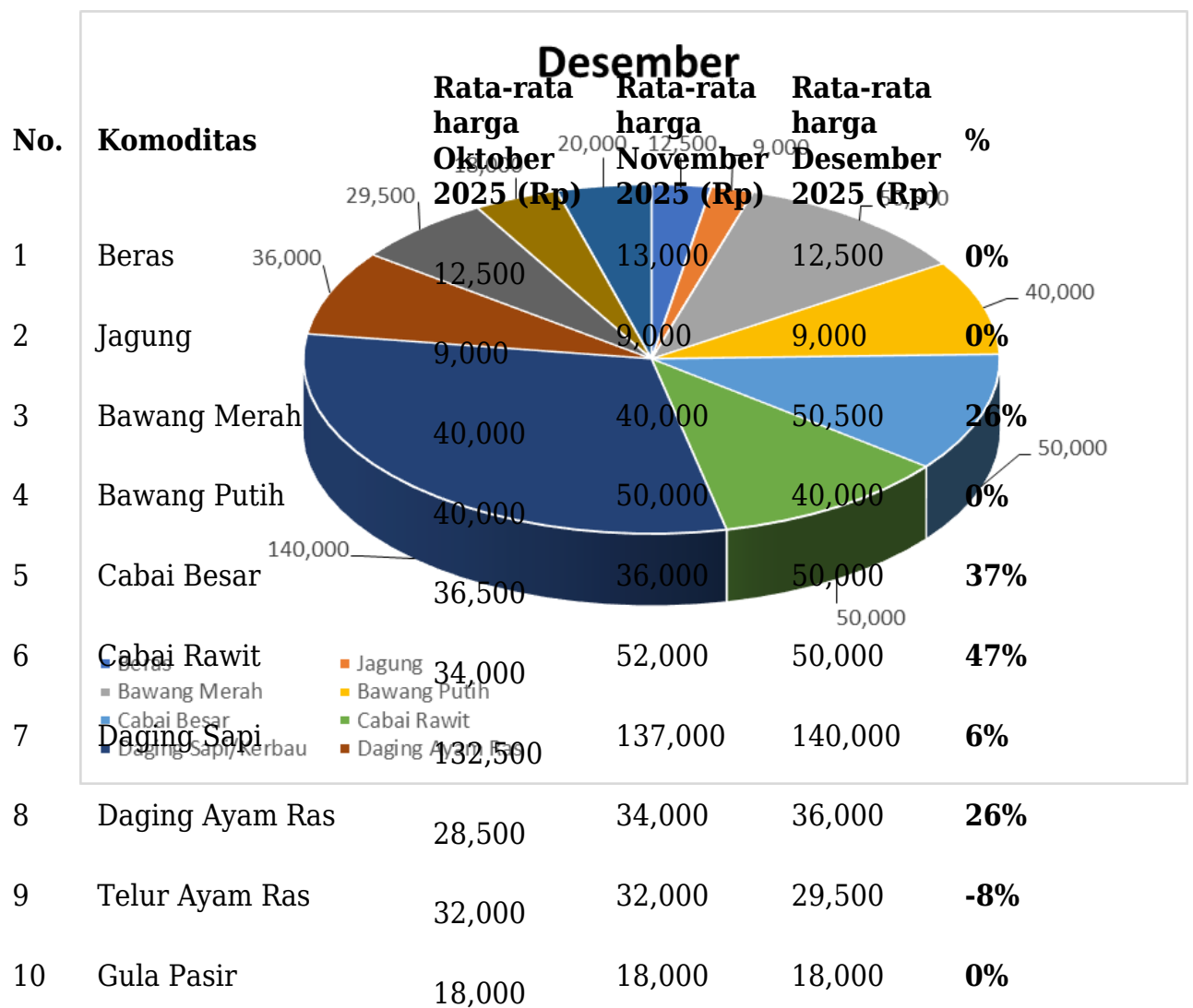


- Beras
- Jagung
- Bawang Merah
- Bawang Putih

November



- Beras
- Bawang Merah
- Cabai Besar
- Daging Sapi/Kerbau
- Telur Ayam Ras
- Jagung
- Bawang Putih
- Cabai Rawit
- Daging Ayam Ras
- Gula Pasir



11	Minyak Goreng	20,000	20,000	20,000	0%
----	---------------	--------	--------	--------	----

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

II. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

Kendala yang dihadapi oleh TPID Kabupaten Konawe Selatan pada pelaksanaan pengendalian inflasi dengan kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) adalah sebagai berikut:

1. Terjadi fluktuasi harga cabai besar dan cabai rawit pada bulan November-Desember 2025, yang dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun serta keterbatasan pasokan pada periode tertentu, sehingga berkontribusi terhadap kenaikan harga cabai di pasaran;
2. Ketersediaan pasokan bawang merah dan bawang putih belum stabil, khususnya bawang merah yang mengalami kenaikan harga pada bulan Desember 2025 akibat meningkatnya permintaan dan keterbatasan stok dari daerah penghasil, sementara bawang putih dipengaruhi oleh pasokan impor dan distribusi;
3. Harga daging sapi dan daging ayam mengalami kenaikan pada beberapa bulan di Triwulan IV 2025 yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan konsumen menjelang hari besar keagamaan dan akhir tahun, sementara pasokan belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan permintaan tersebut;
4. Gangguan distribusi dan ketergantungan pasokan dari luar daerah masih menjadi permasalahan pada beberapa komoditas strategis, khususnya minyak goreng dan bawang putih, sehingga harga sangat sensitif terhadap kelancaran distribusi dan ketersediaan stok;
5. Ketersediaan dan keterpaduan data pangan strategis daerah masih terbatas, meliputi informasi surplus dan defisit komoditas, pola distribusi antarwilayah, serta proyeksi kebutuhan konsumsi masyarakat, sehingga menyulitkan perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih tepat sasaran dan responsif.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

III. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

Dari Permasalahan yang dihadapi oleh TPID Kabupaten Konawe Selatan pada pelaksanaan pengendalian inflasi dengan kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dengan beberapa langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan *Zoom Meeting* terkait pengendalian inflasi daerah, yang dilaksanakan setiap minggu, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri;

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan menyerahkan Benih Cabai dan Tomat dan saprodi pendukung Pada Poktan harapan jaya Desa Lombueya Kec. Moramo Utara dan Desa Ranowila Kec. Mowila pada tanggal 1 Oktober 2025;

3. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan menyerahkan benih bawang merah dan saprodi pendukung di desa Wawoouru Kec. Palangga pada tanggal 1 Oktober 2025;
4. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan menyerahkan benih Cabai dan saprodi di Desa Monapa Kec. Mowila pada tanggal 2 Oktober 2025;
5. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan menyerahkan Saprodi dan pendukung Komoditas Hortikultura di Desa Punggawu-Kawu Kec. Benua pada 3 Oktober 2025;
6. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan menyerahkan benih Cabai dan saprodi di Desa Pewutaa Kec Angata pada tanggal 3 Oktober 2025;
7. Dinas Ketahanan Pangan melakukan Monev Kebun Kelompok wanita Tani (KWT) Tirta Mandiri Desa Tirta Martani Kec. Buke pada tanggal 13 Oktober 2025;
8. Dinas Ketahanan Pangan melakukan Monev Kebun Kelompok wanita Tani (KWT) Meohai Desa Ambesea Kec. Laeya pada tanggal 14 Oktober 2025;
9. Dinas Ketahanan Pangan melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan Monev Kebun Kelompok wanita Tani (KWT) Mawar Desa Matandahi Kec. Kolono pada tanggal 22 Oktober 2025;
10. Dinas Ketahanan Pangan melakukan Monev Penanganan Kerawanan Pangan di Kelompok Tani Tobi Meita Desa Ambesea Kec. Laeya pada tanggal 22 November 2025;
11. Dinas Ketahanan Pangan melakukan Monev Penanganan Kerawanan Pangan di Kelompok Tani Sumber Sumber Bakti Desa Lipu Masagena Kec. Basala pada 9 Desember 2025;
12. Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 11 Kecamatan Baito, Kolono, Mowila, Benua, Tinaggea, Angata, Ranomeeto Barat, Sabulakoa, Laeya, Landono, Ranameeto dari tanggal 21 Oktober - 12 November 2025;
13. Dinas Peternakan menyerahkan bantuan ternak ayam kampung pada kelompok Mitra Sejahtera desa Sindang Kasih Kec Ranomeeto Barat pada tanggal 14 November 2025;
14. Dinas Peternakan menyerahkan bantuan ternak ayam jopper pada kelompok Karya Mandiri desa Silea Jaya Kec Buke pada tanggal 18 November 2025;
15. Dinas Peternakan menyerahkan bantuan ternak ayam jopper pada kelompok Tani makmur desa Andoolo Utama Kec Buke pada tanggal 19 November 2025;
16. Dinas Peternakan menyerahkan bantuan ternak Ayam kampung pada kelompok tani Samaturu, desa Buke Kec Buke pada tanggal 02 Desember 2025;
17. Dinas Peternakan menyerahkan bantuan ternak Sapi Indukan pada kelompok tani Tani Mekar Desa Aepodu Kec Laeya pada tanggal 09 Desember 2025;
18. Dinas Peternakan menyerahkan bantuan ternak ayam petelur pada kelompok Waraka Sejahtera Desa Amasara Kec Baito pada tanggal 11 Desember 2025;
19. Dinas Peternakan menyerahkan bantuan kandang kambing pada kelompok tani Muda Berdampak Desa Rapea kec Tinanggea pada tanggal 12 Desember 2025;
- 2.

Melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

20.

Kabupaten Konawe Selatan pada Semester II, pada tanggal 23 Desember 2025 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Konawe Selatan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

IV. EVALUASI KEBIJAKAN

1. Evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi melalui kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor telah berjalan, namun masih perlu penguatan pada aspek ketersediaan pasokan komoditas hortikultura strategis;
2. Evaluasi program Gerakan Masyarakat Menanam Cabai/Lombok (Gemar Meambo) menunjukkan kontribusi positif terhadap ketahanan pangan rumah tangga, namun dampaknya terhadap stabilisasi harga di tingkat pasar masih terbatas karena skala produksi yang relatif kecil;
3. Evaluasi pelaksanaan penyaluran benih dan sarana produksi hortikultura menunjukkan perlunya peningkatan akurasi sasaran penerima dan kesinambungan pendampingan teknis agar hasil produksi lebih optimal dan berkelanjutan;
4. Evaluasi kegiatan monitoring dan evaluasi kebun Kelompok Wanita Tani (KWT) menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan pekarangan cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan dan pemasaran hasil;
5. Evaluasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) menunjukkan efektivitas dalam menjaga keterjangkauan harga pada periode tertentu, namun pelaksanaannya masih bersifat temporer dan perlu integrasi dengan kebijakan pasokan jangka menengah;
6. Evaluasi bantuan sektor peternakan (ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, sapi, dan kambing) menunjukkan adanya peningkatan produksi protein hewani, namun masih diperlukan pengawasan keberlanjutan program dan peningkatan kapasitas kelompok penerima;
7. Evaluasi pengendalian harga komoditas hortikultura strategis (cabai, bawang merah, dan bawang putih) menunjukkan bahwa fluktuasi harga masih dipengaruhi oleh faktor cuaca, musim, dan ketergantungan pasokan dari luar daerah;
8. Evaluasi kelancaran distribusi dan logistik pangan menunjukkan masih adanya hambatan geografis dan infrastruktur yang berdampak pada ketersediaan pasokan serta stabilitas harga di pasar tradisional;
9. Evaluasi ketersediaan data dan informasi pangan strategis daerah menunjukkan perlunya penguatan sistem pendataan produksi, stok, dan kebutuhan konsumsi sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih tepat sasaran;
10. Evaluasi koordinasi dan komunikasi TPID menunjukkan bahwa mekanisme rapat dan pelaporan telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan penguatan sinergi program antar perangkat daerah agar kebijakan pengendalian inflasi

lebih terintegrasi dan berdampak nyata.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

V. REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah daerah disarankan melakukan pendampingan intensif pasca penyaluran, khususnya pada komoditas strategis penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah, agar hasil panen dapat terserap pasar secara tepat waktu dan berkontribusi langsung terhadap stabilisasi harga;
2. Optimalisasi peran Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai basis ketahanan pangan rumah tangga perlu diperkuat. Program *Monev Kebun Kelompok* yang telah dilaksanakan hendaknya tidak hanya bersifat monitoring, tetapi ditindaklanjuti dengan penguatan kapasitas produksi, pengolahan hasil, dan akses pemasaran. Hal ini penting untuk menekan volatilitas harga pangan di tingkat konsumen, terutama pada komoditas sayuran dan bumbu dapur;
3. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) perlu dilakukan secara lebih terarah dengan berbasis peta wilayah rawan inflasi. Penentuan lokasi dan waktu GPM disarankan mempertimbangkan tren kenaikan harga, momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta daya beli Masyarakat;
4. Penguatan sistem distribusi dan logistik pangan daerah melalui peningkatan aksesibilitas distribusi pada wilayah dengan kendala geografis, optimalisasi jalur distribusi alternatif, serta pemanfaatan simpul distribusi lokal seperti BUMD, koperasi, dan kelompok tani guna memperpendek rantai pasok dan menjaga stabilitas pasokan di pasar tradisional;
5. Optimalisasi peran TPID sebagai koordinator kebijakan pengendalian inflasi daerah dengan memastikan setiap hasil rapat koordinasi ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi yang terukur, memiliki indikator kinerja, serta dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan terkait;
6. Penguatan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi kepada publik melalui penyampaian informasi yang transparan mengenai kondisi pasokan, harga, dan kebijakan pemerintah daerah guna menjaga ekspektasi inflasi dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat.